

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu WaTa'ala, atas rahmat dan ijin-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Bappeda Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan demikian LPPD Bappeda Kabupaten Mempawah Tahun 2025 ini merupakan informasi capaian pelaksanaan kinerja pembangunan selama 1 (satu) Tahun 2025 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mempawah dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Selanjutnya, kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan LPPD Bappeda Kabupaten Mempawah, kami ucapkan banyak terimakasih dan semoga LPPD Bappeda Kabupaten Mempawah Tahun 2025 dapat bermanfaat dalam memberikan informasi terhadap Penyusunan LPPD Bupati Kabupaten Mempawah Tahun 2025.

Mempawah, Januari 2026
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mempawah,

AMI FEBRIYANTO, ST.MT
NIP. 19780220 200212 1005



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah;

Prioritas pembangunan daerah merupakan gambaran prioritas pembangunan tahunan rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan dalam RPJMD. Prioritas pembangunan akan menjadi tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah mencapai sasaran lima tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Penetapan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mempawah tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit prioritas bagi kinerja pembangunan daerah. Sebagai upaya sinergitas dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, dalam proses penyusunannya, prioritas pembangunan Kabupaten Mempawah disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan prioritas nasional. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan diseluruh level pemerintahan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta pentahapan pembangunan sebagaimana tertuang di atas, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi tersebut sebagaimana yang harus dicapai pada tahun pertama RPD Kabupaten Mempawah dan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
RPD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025-2026**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1: Mewujudkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah yang Berkualitas			
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan Beasiswa kejar paket, siswa sekolah dan mahasiswa Sertifikasi tenaga pendidik	Penguatan kolaborasi untuk pembangunan ekonomi inklusif menuju peningkatan produktivitas dan pemertaan infrastruktur
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	
		Penurunan angka stunting	
	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender	Perluasan cakupan kampung KB aktif Optimalisasi pembangunan kota layak anak	

b. Visi dan Misi Kepala Daerah;

Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dalam RPJPD diungkapkan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Mempawah hingga tahun 2025 adalah “*Terwujudnya Mempawah Maju dan Berdaya Saing*”. Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Mempawah, maka perumusan visi Kabupaten Mempawah 2025-2029 diselaraskan dengan dokumen RPJPD 2005–2025, yaitu *Terwujudnya Mempawah Cerdas, Mandiri dan Terdepan*.

**Tinjauan Visi RPJPD dalam Perumusan Visi RPJMD
Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029**

Visi RPJPD	Pokok-Pokok Visi RPJPD	Pernyataan Visi RPJMD
Kabupaten Mempawah yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan.	• Maju Kemajuan dari sisi ekonomi tercermin pada perkembangan ekonomi, transformasi struktur ekonomi, sektor industri dan sektor jasanya berkembang, tingkat kemakmuran meningkat yang tercermin pada peningkatan pertumbuhan PDRB dan peningkatan PDRB per kapita. • Berdaya Saing Mengandung makna suatu kemampuan dan ketangguhan daerah terhadap tatanan dasar yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang. • Sejahtera Mengandung makna bahwa Kabupaten Mempawah menjadi kabupaten yang masyarakatnya makmur dilihat dari perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, kesehatan dan <i>civilization</i> (politik dan hukum) yang maju dengan pembagian yang lebih adil dan merata. • Berkelanjutan Mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.	Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Cerdas, Mandiri dan Terdepan dan Berkelanjutan

Selain berpedoman terhadap visi RPJPD Kabupaten Mempawah, perumusan visi RPJMD Kabupaten Mempawah 2025-2029 juga memperhatikan isu strategis pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Visi di tingkat provinsi Kalimantan Barat yang tercantum dalam RPJPD 2025-2045 yaitu "Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan" memiliki keselarasan dengan visi nasional yang berfokus pada kemajuan dan keberlanjutan. RPJMD 2025-2029 menambahkan dimensi yang lebih operasional dengan penekanan pada nilai-nilai keadilan, demokrasi, religiusitas, kesejahteraan, dan perhatian terhadap lingkungan. Ini menunjukkan bahwa pengembangan Kalimantan Barat tidak hanya mencakup aspek kemajuan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan keberlanjutan yang lebih spesifik, sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh daerah tersebut. Visi Kabupaten Mempawah dalam RPJPD 2025-2045, mengarah pada "Kabupaten Mempawah yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan." Ini mencerminkan upaya untuk memajukan daerah dengan peningkatan daya saing dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Visi RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Cerdas, Mandiri, Terdepan, dan Berkelanjutan."

Penekanan pada kemandirian, kecerdasan, dan keunggulan menunjukkan bahwa Kabupaten Mempawah berfokus pada pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung pencapaian kemandirian dan kemajuan daerah secara mandiri.

Kesinambungan yang baik terjalin antara visi pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten. Visi-visi yang ada di setiap tingkat pemerintahan saling menguatkan dan mencerminkan tujuan yang sama, yaitu pencapaian pembangunan yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan, dengan perhatian khusus pada keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di masing-masing daerah. Pencapaian visi ini sangat bergantung pada integrasi yang baik antara kebijakan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, serta keberhasilan implementasi program yang ada di masing-masing tingkatan tersebut.

Misi

Misi pembangunan daerah Kabupaten Mempawah untuk periode 2025-2029 dirancang sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi daerah yang cerdas, mandiri, terdepan, dan berkelanjutan. Misi ini akan menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur yang mendukung kemandirian daerah, serta peningkatan daya saing ekonomi yang berkelanjutan. Melalui misi pembangunan yang jelas dan terfokus, diharapkan Kabupaten Mempawah dapat mengatasi tantangan yang ada dan mencapai kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Berikut adalah misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029:

1. *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif dan profesional*
2. *Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat*
3. *Membangun Infrastruktur Publik secara Merata dan berwawasan lingkungan*
4. *Meningkatkan Perekonomian Daerah dengan memanfaatkan potensi unggulan dan peningkatan investasi*

Tinjauan Visi RPJMD dalam Perumusan Misi RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029

Visi RPJMD	Pernyataan Misi RPJMD
Cerdas	• Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat
Mandiri	• Misi 4 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dengan memanfaatkan Potensi Unggulan dan Peningkatan Investasi.
Terdepan	• Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif dan profesional
Berkelanjutan	• Misi 3 : Membangun Infrastruktur publik secara merata dan berwawasan lingkungan

Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, yaitu Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Tujuan ini secara langsung mencerminkan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah

Misi Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat, yaitu Menyediakan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk layanan pendidikan dan kesehatan (pendidikan dan layanan kesehatan gratis). Menambah sekolah vokasi (*vocational training dan vocational school*) untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Bersamaan dengan itu dibutuhkan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang berkualitas dan terdistribusi secara merata di tiap kecamatan, selain sarana dan prasarana fasilitas pendukung.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dapat dilakukan melalui perluasan lapangan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru agar masyarakat miskin dan menganggur semakin berkurang.

Misi Membangun Infrastruktur Publik secara merata dan berwawasan lingkungan yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menata pelabuhan samudra yang berwawasan lingkungan, menambah ruang terbuka hijau, yang kesemuanya ini didasarkan pada kesesuaian tata ruang dan daya dukung lingkungan serta diorientasikan untuk mendorong peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan.

Misi Meningkatkan Perekonomian Daerah dengan memanfaatkan Potensi Unggulan dan Peningkatan Investasi yaitu meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada masyarakat ditetapkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal, serta meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan umum; memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis Sumber Daya Alam dan pengembangan sektor unggulan.

c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
				Implementasi Sistem Informasi Pembanagunan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		Penelitian Dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Indikator Makro merupakan indikator kinerja utama Pemerintah Daerah yang menjadi alat ukur ketercapaian visi dan misi pada akhir periode RPJMD. Keberhasilan visi dan misi tersebut diukur dari pencapaian kinerja Perangkat Daerah terhadap target indikator sasaran Pembangunan daerah. Capaian indikator makro pembangunan menggambarkan kinerja aspek Pembangunan manusia dan aspek Pembangunan Ekonomi. Aspek pembangunan manusia diwakili oleh indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan aspek Pembangunan Ekonomi diwakili oleh indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, dan tingkat kemiskinan.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	2	4	5	6	7	8
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,00	66,91	68,91	69,63	70.59
2	Angka Kemiskinan (Persen)	5,18	5,32	5,21	4,83	4,49
3	Angka Pengangguran	7,71	7,48	7,33	6,78	4,74
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,10	4,70	5,09	6,62	*
5	Pendapatan Per Kapita	17.883	18.406	34,254	39,506	**
6	Ketimpangan Pendapatan/Gini Rasio	0,283	0,302	0,2910	0,2540	***

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Keterangan :

- * Rilis dalam publikasi Kabupaten Mempawah Dalam Angka Tahun 2025 Tanggal 28 Februari 2026
- ** Rilis dalam Publikasi Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2025 Tanggal 28 Februari 2026
- *** Perkiraan Rilis di Website BPS Prov. KalBar **Maret 2026**, Nilai Indeks Gini Sebelumnya dapat diakses di <https://kalbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDEjMg==/gini-rasio-menurut-kabupaten-kota.html>

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia, menurut *United Nation Development Program* (UNDP) adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk (*people's choice*). Dari sekian banyak pilihan, ada tiga yang dianggap penting, yaitu: panjang umur dan sehat, pendidikan, dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup layak. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia digunakan suatu ukuran yang dinamakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yaitu gabungan dari beberapa indikator. Adapun beberapa indikator tersebut terdiri dari indikator kesehatan (indeks lama hidup), indikator pendidikan (indeks harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indikator ekonomi yang ditunjukkan dengan tingkat daya beli penduduk (*purchasing power parity*). Gabungan dari ketiga indikator ini diharapkan mampu mengukur tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah.

Angka IPM sejak tahun 2010 sudah menyesuaikan dengan metode baru dimana IPM disusun berdasarkan angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Pengeluaran per Kapita (PP). Perkembangan pada masing-masing variabel setiap tahunnya tetap meningkat. Hanya saja, peningkatan kabupaten lain lebih cepat dibandingkan Kabupaten Mempawah.

Nilai IPM suatu wilayah menunjukkan seberapa jauh wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup, pendidikan

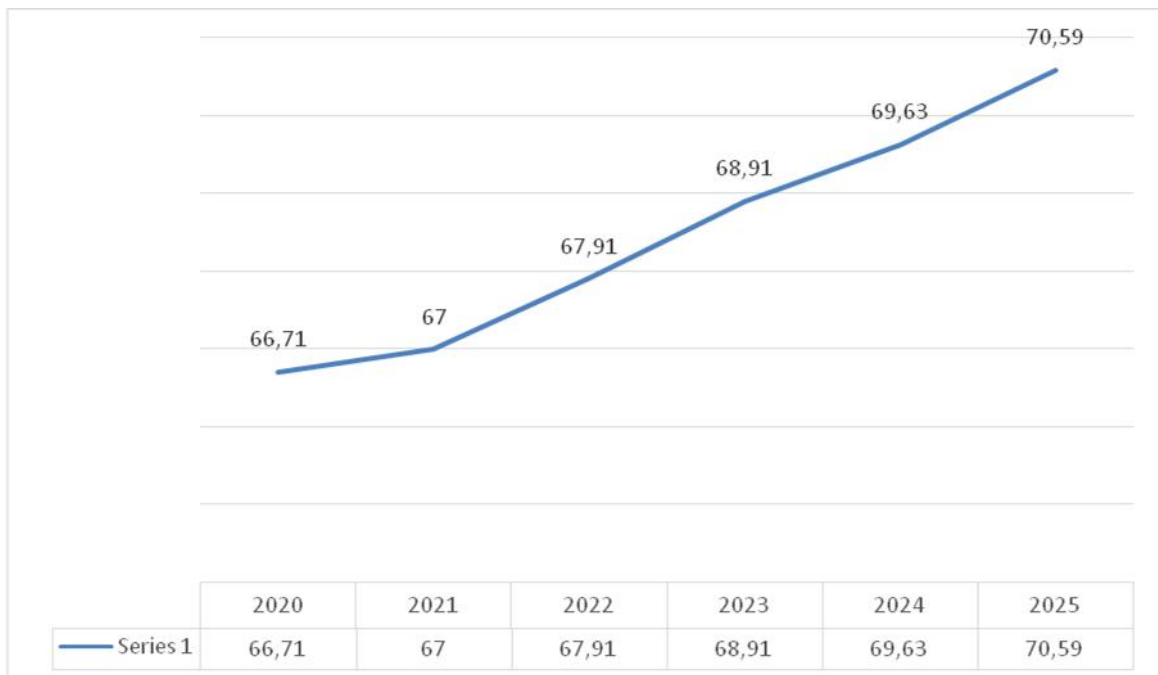
dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. Meskipun naik secara perlahan, namun Kabupaten Mempawah telah menunjukkan keseriusannya dalam percepatan peningkatan IPM ini, sehingga bisa berada di atas Kabupaten Sanggau, Landak, Melawi, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Kayong Utara.

Beberapa usaha yang dilakukan antara lain perbaikan data primer terkait Pendidikan dan Kesehatan, koordinasi dengan pihak Badan Pusat Statistik (BPS), dan Perangkat Daerah terkait untuk memprioritaskan program dan kegiatan yang mendukung percepatan peningkatan IPM ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia(**Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020**) Kabupaten Mempawah pada tahun 2025 meningkat menjadi 70,59 dari 69,63 pada tahun 2024 dan berada pada posisi ke-8 dari 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

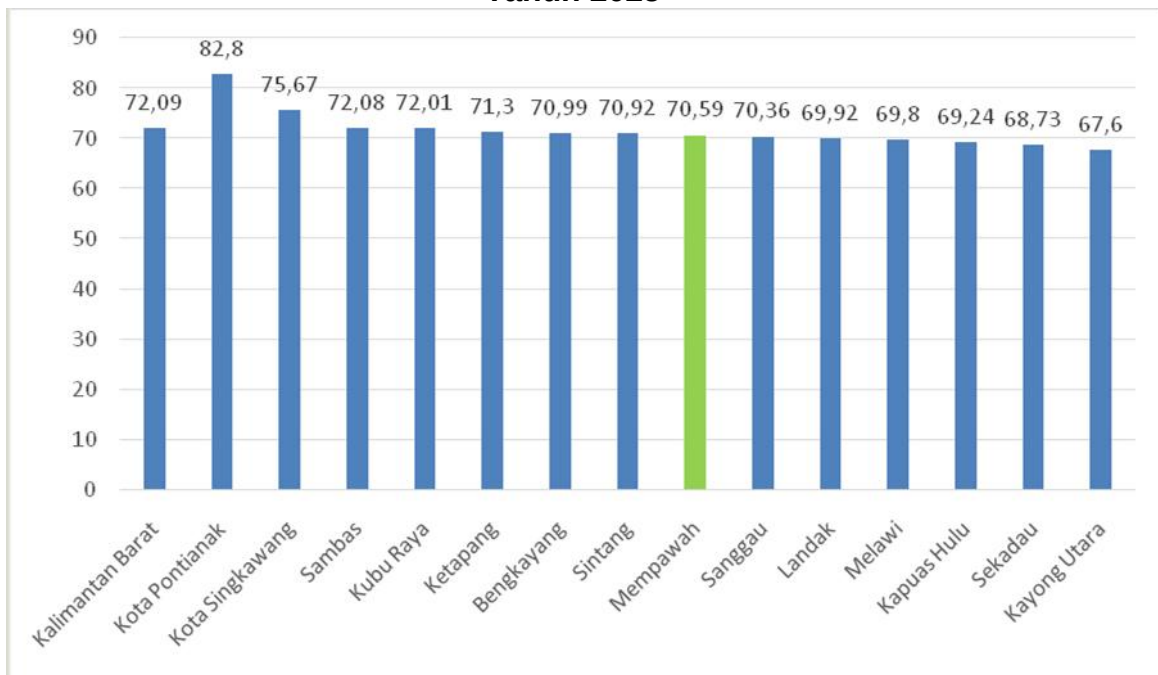
Adapun Kabupaten/Kota dengan IPM tertinggi di Kalimantan Barat adalah Kota Pontianak, kemudian Kota Singkawang, Sambas, Kubu Raya, Ketapang, Bengkayang, Sintang, Mempawah, Sanggau, Landak, Melawi, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Kayong Utara yang merupakan IPM terendah di Kalimantan Barat. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mempawah terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 dengan 66,71 meningkat menjadi 70,59 tahun 2025.

Grafik 3.1
Indeks Pembangunan Manusia Kab. Mempawah
Tahun 2020-2025



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2025

Grafik 3.2
IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat
Tahun 2025



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2025

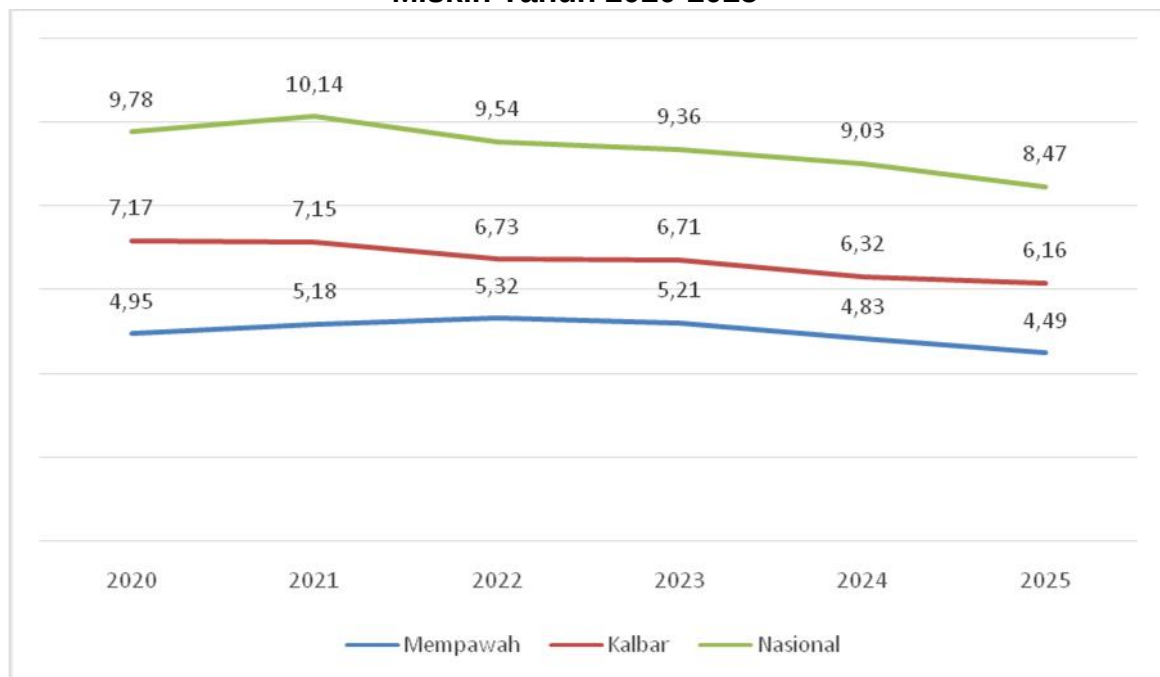
2.1.2. Kemiskinan

2.1.2.1. Persentase Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Grafik 3.3

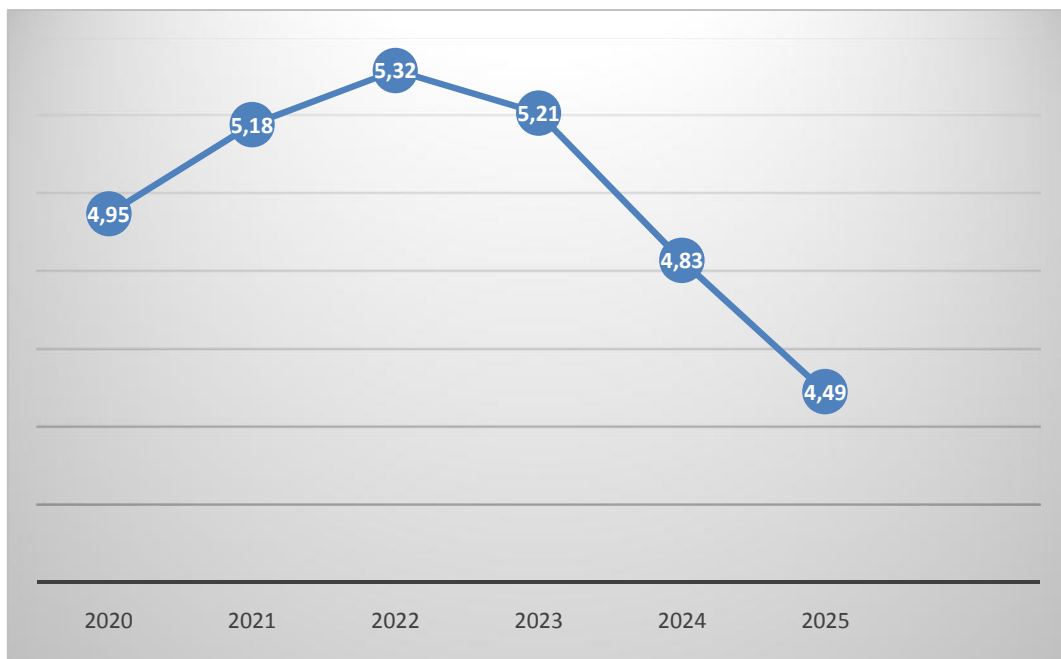
Posisi relatif Kabupaten Mempawah terhadap Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020-2025



*Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kab/Kota di Indonesia 2025
(bps.go.id)*

Posisi Relatif yaitu Membandingkan capaian indikator dengan daerah lain/standar tertentu serta mengetahui capaian daerah dengan capaian di tingkat Provinsi dan Nasional. Persentase penduduk miskin Kabupaten Mempawah tahun 2025 sebesar 4,49 persen. Persentase kemiskinan Kabupaten Mempawah juga lebih baik dari capaian Provinsi Kalimantan Barat yang mencapai 6,16 persen dan capaian Nasional sebesar 8,47 persen.

Grafik 3.4
Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Mempawah 2020-2025



Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2025

Analisis Perkembangan Antar Waktu yaitu Mengamati capaian terakhir dan membandingkan dengan tahun sebelumnya, grafik diatas menunjukan tingkat kemiskinan di Kabupaten Mempawah dalam rentang waktu 2020-2025, dimana Pada periode awal, tingkat kemiskinan menunjukkan **kenaikan dari 4,95% → 5,32%** dalam dua tahun. Ini menunjukkan bahwa meskipun awalnya rendah, persentase miskin sempat meningkat—kemungkinan dipengaruhi oleh *shock* ekonomi seperti pandemi COVID-19 yang berdampak pada pendapatan rumah tangga. Sejak 2022, terjadi penurunan bertahap: tahun **2023**: turun menjadi 5,21%
tahun **2024**: turun lagi ke 4,83%, tahun **2025**: turun lebih jauh ke **4,49%**. Ini menandakan bahwa program pengentasan kemiskinan dan pemulihan ekonomi mulai memberikan dampak positif, sehingga persentase penduduk miskin semakin berkurang.

2.1.2.2. Garis Kemiskinan (RP)

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari.

Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

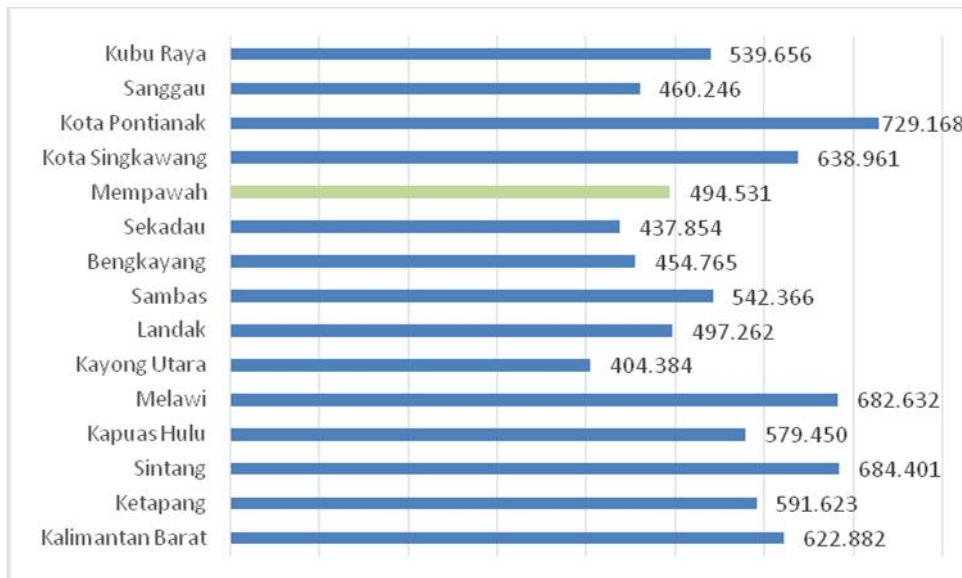
Grafik 3.5

Perkembangan Antar Waktu Garis Kemiskinan Kab. Mempawah Tahun 2017-2025



Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2025

Grafik 3.6
Garis Kemiskinan Kab/Kota di Kalimantan Barat 2025

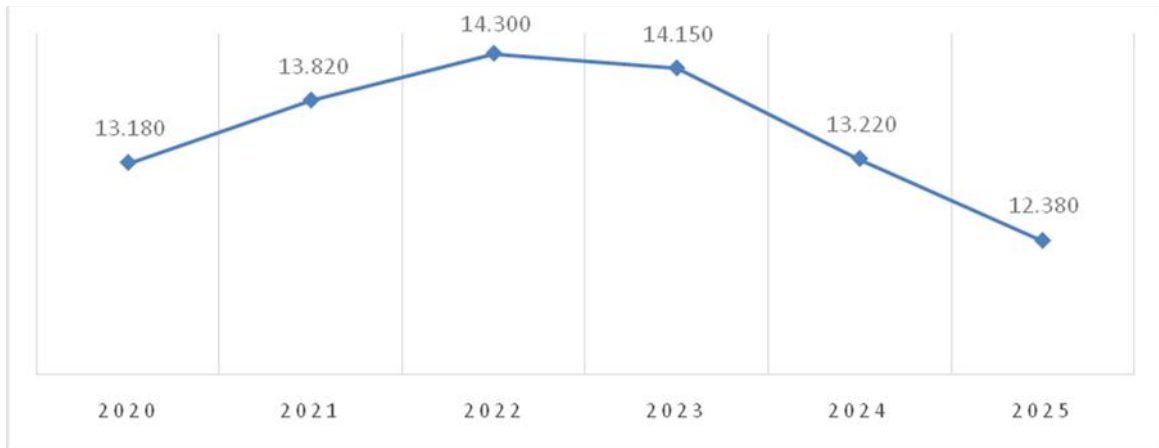


Garis kemiskinan di Kabupaten Mempawah tahun 2025 sebesar Rp. 494.531 berada diposisi kelima terendah setelah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Kayong Utara. Untuk garis kemiskinan paling tinggi yaitu Kota Pontianak dengan garis kemiskinan Rp. 729.168 per kapita per bulan. Garis Kemiskinan Kabupaten Mempawah berada jauh dibawah garis kemiskinan provinsi sebesar Rp. 622.882.

2.1.2.3. Jumlah Penduduk Miskin

Pada tahun 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mempawah sebesar 12,38 ribu jiwa, jumlah ini menurun 840 jiwa dari tahun 2024. Posisi tertinggi jumlah penduduk miskin ada ditahun 2022 yang mencapai 14.300 jiwa, dengan program-program pemerintah daerah yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam tiga tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mempawah dapat berkurang sekitar 1.920 jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penurunan kemiskinan di Kabupaten Mempawah mulai memasuki tahapan yang paling sulit karena tingkat kemiskinan yang sudah cukup rendah akan sulit untuk diturunkan lebih rendah lagi.

Grafik 3.6
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mempawah 2020-2025

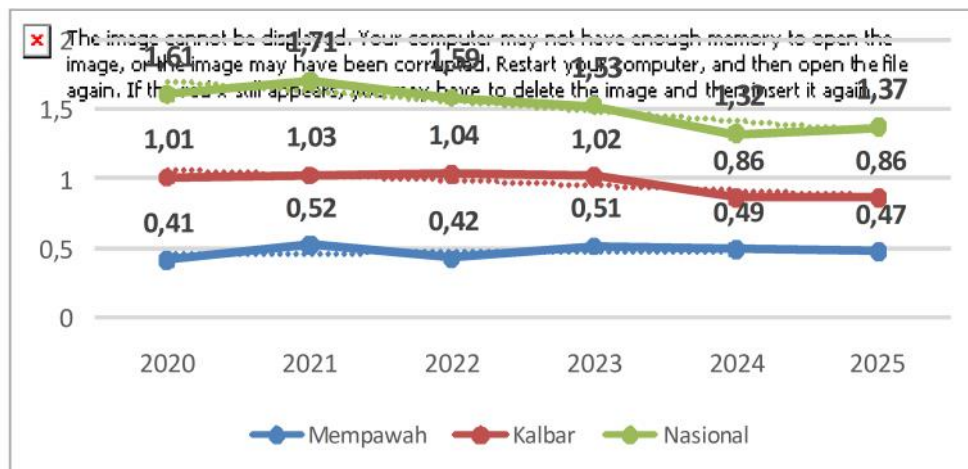


Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2025

2.1.2.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Grafik 3.7
Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mempawah, Provinsi dan Nasional 2020-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik (bps.go.id) Tahun 2025

Secara umum tingkat kemiskinan di Kabupaten Mempawah mengalami penurunan, berbeda dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Mempawah yang bergerak fluktuatif namun secara *time series* lima tahun terakhir cenderung stagnan. Ditahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,41% kemudian meningkat lagi ditahun 2021 sebesar 0,52, pada tahun 2022 menurun menjadi 0,42 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,51, kemudian tahun 2024 dan 2025 menurun menjadi 0,49 dan 0,47. Ini menjadi bahan evaluasi tersendiri bagi pemerintah daerah dalam penyusunan program yang akan memengaruhi tidak hanya dari persentase penduduk miskin, tetapi juga penurunan indeks kedalaman kemiskinan itu sendiri.

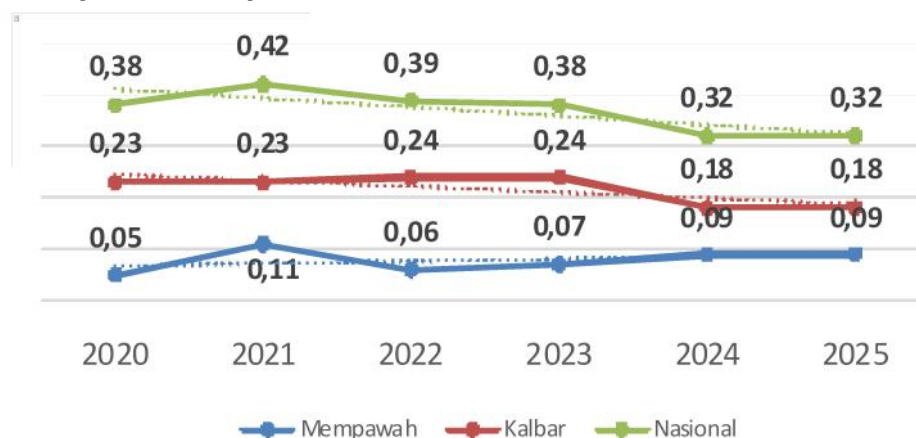
Untuk menurunkan indeks kedalaman kemiskinan perlu ada upaya kontinyu dari Pemerintah Kabupaten. Salah satunya dengan program yang menyentuh langsung masyarakat miskin seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Prakerja, BLT UMKM, Insentif tarif listrik, dll karena jika program terputus maka indeks kedalaman kemiskinan bisa meningkat lagi.

2.1.2.5. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Grafik 3.8

Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparahan Kemiskinan kabupaten Mempawah, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2025

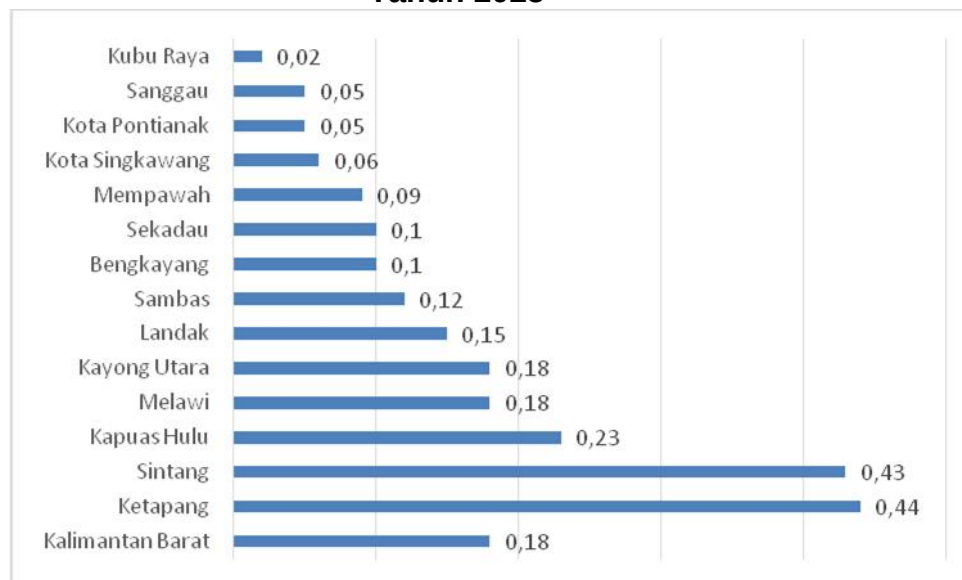


Sumber : Badan Pusat Statistik (bps.go.id) Tahun 2025

Tahun 2020 merupakan tahun dimana posisi indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Mempawah berada dalam fase terendah dalam kurun lima tahun terakhir sejak tahun 2017 sebesar 0,5 namun terjadi kenaikan ditahun 2021 dikarenakan Pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Mempawah kembali mengalami penurunan menjadi 0,06. Dan pada tahun 2023 indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Mempawah meningkat menjadi 0,07. Selanjutnya pada tahun 2024 dan 2025 kembali meningkat menjadi 0,09.

Grafik 3.9

Indeks Keparahen Kemiskinan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik (bps.go.id) Tahun 2025

Dalam grafik diatas dapat dilihat Kabupaten Mempawah berada dalam posisi kelima terendah setelah Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau dan Kubu Raya.

1. Pengangguran

Pengangguran merupakan masalah besar bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Tingginya angka pengangguran mempunyai dampak negatif tidak hanya pada masalah ekonomi, tetapi juga menjadi pemicu kerawanan sosial. Pengangguran sangat berdampak pada kehidupan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang menurun, dan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun adalah salah satu dampak pengangguran. Pengangguran pada umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak diikuti dengan perluasan kesempatan kerja, selain itu angkatan kerja yang tersedia tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*), atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*future starts*). Secara rinci, yang termasuk kategori pengangguran yaitu:

1. Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka :
 - Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
 - Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
 - Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan. Mereka yang sedang bekerja atau yang sedang dibebaskan tugas, baik akan dipanggil kembali ataupun tidak, dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.

2. Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang “baru”, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas

resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila “tindakannya nyata”, seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat izin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan. Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha. Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Kegiatan mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bias dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih berusaha untuk mempersiapkan suatu kegiatan usaha.

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, tren indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. TPT dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tergolong penganggur, dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya contoh kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Mempawah
Tahun 2020-2025

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penduduk	301.560	305.673	310.927	312.785	316.728	belum rilis
Jumlah Tenaga Kerja	195.595	198.153	200.716	236.002	239.309	belum rilis
Angkatan Kerja	125.463	120.592	127.069	161.108	174.861	belum rilis
Bekerja	115.985	111.290	117.570	149.295	163.014	belum rilis
Pengangguran	9.478	9.302	9.499	11.813	11.847	belum rilis
Bukan Angkatan Kerja	70.132	77.561	73.647	74.894	64.448	belum rilis
Sekolah	13.522	14.356	14.555	19.875	14.969	belum rilis
Mengurus Rumah Tangga	45.269	46.636	48.275	45.764	40.338	belum rilis
Lainnya	11.341	16.569	10.817	9.255	9.141	belumr ilis
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,55%	7,71%	7,48%	7,33%	6,78%	4,74 %

Sumber BPS, Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mempawah menunjukkan kinerja yang membaik sejak terjadinya Covid-19 pada tahun 2020. Hal ini tercermin dari terus menurunnya tingkat pengangguran dari 7,71 persen tahun 2021 menjadi 4,74 persen di tahun 2025 yang merupakan tingkat pengangguran terendah di Kabupaten Mempawah selama periode 2020-2025 .

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

Jalan Chandramidi No.1 Telp. (0561) 691166
Faks. (0561) 691475 MEMPAWAH 78911

CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2025

Kab/Kota	Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020)	
	2025	
Kalimantan Barat		72,09
Sambas		72,08
Bengkayang		70,99
Landak		69,92
Mempawah		70,59
Sanggau		70,36
Ketapang		71,30
Sintang		70,92
Kapuas Hulu		69,24
Sekadau		68,73
Merawi		69,80
Kayong Utara		67,60
Kubu Raya		72,01
Kota Pontianak		82,80
Kota Singkawang		75,67

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (5 November 2025). *Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020), 2025*. Diakses pada 7 Januari 2026, dari <https://kalbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDA3Izl=indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota--umur-harapan-hidup-hasil-long-form-sp2020-.html>

Mempawah, 07 Januari 2026
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Mempawah,



AMI FEBRIYANTO ST,MT
NIP. 19780220-200212 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Jalan Chandramidi No.1 Telp. (0561) 691166
Faks. (0561) 691475 MEMPAWAH 78911

CAPAIAN KEMISKINAN TAHUN 2025

Kab/Kota	Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota					
	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	
	2025	2025	2025	2025	2025	2025
Kalimantan Barat	622.882,00	6,16	330,95	0,86		0,18
Sambas	542.366,00	6,37	35,07	0,72		0,12
Bengkayang	454.765,00	5,83	16,09	0,59		0,10
Landak	497.262,00	8,90	35,34	0,85		0,15
Mempawah	494.531,00	4,49	12,38	0,47		0,09
Sanggau	460.246,00	4,61	22,93	0,35		0,05
Ketapang	591.623,00	8,44	46,82	1,59		0,44
Sintang	684.401,00	7,93	35,02	1,34		0,43
Kapuas Hulu	579.450,00	6,86	19,47	1,03		0,23
Sekadau	437.854,00	5,61	11,64	0,56		0,10
Melawi	682.632,00	10,51	23,36	1,01		0,18
Kayong Utara	404.384,00	8,75	10,58	1,03		0,18
Kubu Raya	539.656,00	3,99	24,40	0,26		0,02
Kota Pontianak	729.166,00	4,00	27,50	0,37		0,05
Kota Singkawang	638.961,00	4,28	10,36	0,47		0,08

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (12 November 2025).
Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, 2025. Diakses pada 7 Januari 2026, dari
<https://kalbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDAMg==/kemiskinan-menurut-kabupaten-kota.html>

Mempawah, 07 Januari 2026
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Mempawah,



AMI FEBRIYANTO, ST.MT
NIP. 19780220 200212 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
Jalan Chandramidi No.1 Telp. (0561) 691166
Faks. (0561) 691475 MEMPAWAH 78911

CAPAIAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TAHUN 2025

Kab/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kab/Kota (Persen)	
	2025	
Kalimantan Barat		4,82
Sambas		4,91
Bengkayang		2,95
Landak		2,69
Mempawah		4,74
Sanggau		3,89
Ketapang		6,75
Sintang		2,78
Kapuas Hulu		2,09
Sekadau		2,54
Melawi		2,94
Kayong Utara		3,77
Kubu Raya		6,88
Kota Pontianak		7,91
Kota Singkawang		7,42

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (5 November 2025). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kab/Kota, 2025*. Diakses pada 7 Januari 2026, dari <https://kalbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEjMg==/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kab-kota-persen-.html>

Mempawah, 07 Januari 2026
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Mempawah,


AMI FEBRIYANTO, ST, MT
NIP. 19780220 200212 1 005